

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2004. Undang – Undang No. 32 tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*. ———— 2014. Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang *Desa*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Dana Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Republik Indonesia No. 22 Tahun 2016 tentang Pendapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019
- Peraturan Daerah Kab. Poso No. 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
- Peraturan Desa Bega No. 4 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019
- Bastian, Indra, 2006. Akuntansi Sektor Republik, Erlangga, Jakarta
- Hanafi dan Halim. 2004 Akuntansi Keuangan dan Manajemen, edisi pertama, BPFE, Yogyakarta
- Husnan dan Pudji Astuti. 2000. Pengertian Kinerja Keuangan Merupakan Keputusan Individual, Erlangga, Jakarta
- Afiah, Nunuy Nur. 2009. Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah.
- Jannaini. Yuli. 2012. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasi terhadap Akuntansi Pemerintahan Daerah. Program Studi Universitas Komputer Indonesia. Bandung
- Riyanto, Bambang. 2008. Dasar – Dasar Pembelajaran Perusahaan, BPFE, Yogyakarta

S. Munawir .2001. Analisis Laporan Keuangan, Edisi ke 4, Liberty, Yogyakarta
Sulumin, Hasan Husin. 2015. Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana
Desa Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Donggala. ISSN 2303-2019. E-
Jurnal katalogis. Volume 3. Nomor 1. Hal 43 -53

Widjaja, HAW. 2003. Pemerintah Desa dan Administrasi. Jakarta: Rajawali Press

Widjaja, HAW.2001 Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta. 2003 Otonomi Desa Merupakan Otonom yang Bulat dan
Utuh, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

www.bpkp.go.id/public/unit/sakd/files/juklakbimkonkeudesas.pdf

www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/11/paparan-kemenkue.pdf

